

JURNAL MANEKSI VOL 12, NO. 2, JUNI 2023

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOTA MAGELANG PERIODE 2016 – 2021 PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN RASIO KEUANGAN

Annisa Nur Afifah¹⁾, Ilyas Febriyan²⁾, Risma Wira Bharata³⁾

^{1,2,3)}Akuntansi dan Universitas Tidar

^{1,2,3)}annisanurafifah025@gmail.com, ilyasfebriyan26@gmail.com, rismawirab@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the financial performance of the local government of Magelang City for the 2016–2021 fiscal year period. This calculation is carried out using financial ratios which include the regional independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and revenue growth analysis. This research uses a quantitative descriptive method with ratio analysis. The secondary data used in this analysis is the Magelang City APBD Realization Report for the period 2016-2021. Based on the results of the study, the level of independence of Magelang City for the 2016-2021 budget period is in the good category, the effectiveness ratio shows very effective, the efficiency ratio shows less efficient performance, while for revenue growth analysis for the 2016-2021 budget period shows fiscal year instability. The local government of Magelang city is expected to be able to accelerate revenue growth by implementing regional financial management properly, increasing regional economic potential and resource quality.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang periode tahun anggaran 2016 – 2021. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan analisis pertumbuhan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio. Data sekunder yang digunakan dalam analisis ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Magelang periode 2016 – 2021. Berdasarkan hasil penelitian , tingkat kemandirian Kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021 dalam kategori baik, rasio efektivitas menunjukkan sangat efektif, rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang kurang efisien, sedangkan untuk analisis pertumbuhan pendapatan periode anggaran 2016 – 2021 menunjukkan ketidakstabilan tahun fiskal. Pemerintah daerah Kota Magelang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan pendapatan dengan melaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, meningkatkan potensi ekonomi daerah dan kualitas sumber daya.

Kata kunci: Kemandirian; Efektifitas; Efisiensi; Pertumbuhan Pendapatan

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan suatu entitas yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik diwilayah daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi sedemikian rupa sehingga pengelolaan keuangan memenuhi asas ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (Purboyo & dkk, 2021) dalam (Lubis, et al., 2023). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan penyelenggaraan perekonomian daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan. Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah dana daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus memiliki sifat efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat (Qur'ani & Panggiarti, 2021).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pendekatan berbasis kinerja digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah (Mataris & , 2022). Setiap pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menentukan implikasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan APBD. Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah (Mariasari & Sunaningsih, 2021). Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mengacu pada sistem moneter atau non moneter dari hasil yang diperoleh sebagai hasil dari suatu pekerjaan atau aktivitas, proses entitas. Sedangkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah adalah tingkat kegiatan yang dicapai dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan

dan belanja daerah dalam suatu periode anggaran dengan menggunakan sistem keuangan yang dipilih berupa indikator keunagan yang dihasilkan oleh sistem pelaporan akuntabilitas dalam bentuk perhitungan APBD (Susanto, 2019).

Tujuan penilaian kinerja pemerintah daerah adalah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan daerah, memberikan kesempatan belajar kepada karyawan, meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, memotivasi karyawan, secara sistematis mempertimbangkan kompensasi dan hukuman, yang terakhir menciptakan akuntabilitas publik (Anshori, 2019). Dalam hal ini penilaian pengelolaan kinerja pemerintah daerah kota magelang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu hasil dari analisis tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian ekonomi daerah Kota Magelang, efektivitas PAD Kota Magelang, Efisiensi PAD Kota Magelang dan pertumbuhan PAD Kota Magelang.

Berdasarkan penjelasan diatas, apakah Kota Magelang mengeola pemerintahan secara mandiri, efektif, efisien dan pertumbuhan pendapatan bagus berdasarkan analisis rasio keuangan pada periode 2016-2021, maka peneliti mengambil topik pembahasan mengenai analisis kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan dengan judul artikel “ ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOTA MAGELANG PERIODE 2016-2021 PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN RASIO KEUANGAN”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja adalah gambaran seberapa baik dan jauh pelaksanaan suatu program maupun kebijakan telah tercapai dalam mencapai tujuan, sasaran, visi & misi daerah tersebut. Pengukuran kinerja adalah proses mengukur kecukupan kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi biasanya dipandu oleh perencanaan strategis, yang diawali dengan visi dan misi, filosofi dan kebijakan. Selain itu, ketika merumuskan tujuan dan sasaran, menyiapkan program dan anggaran, menentukan tugas dan kegiatan referensi harus dibuat untuk rencana strategis yang disiapkan (Mokodompit, et al., 2014). Untuk melakukan pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis laporan keuangan. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan, salah satunya analisis rasio keuangan (Marliani, 2022).

Berdasarkan PP NO 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur dari posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan penyajian terstruktur dari posisi keuangan transaksi yang dilakukan oleh entitas suatu pemerintah daerah. PP NO 71 tahun 2010,

menyebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari (Pramono, 2014) :

- a) Laporan realisasi anggaran (LRA)
- b) Neraca
- c) Laporan arus kas (LAK)
- d) Laporan operasional (LO)
- e) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
- f) Laporan perubahan ekuitas (LPE)
- g) Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Analisis rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pad, rasio efisiensi pad, dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah.

1) Rasio kemandirian daerah

Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah total pendapatan PAD dengan total pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Jika koefisien kemandirian daerah semakin tinggi, hak ini berarti menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik dan tidak tergantung pada transfer dari pusat (Kawatu, 2019). Kriteria dalam menentukan kemandirian daerah dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1.Kriteria kemandirian daerah

Percentase	Kriteria	Keterangan
0 - 10	SK	Sangat kurang
10 - 20	K	Kurang
20 - 30	S	Sedang
30 - 40	C	Cukup
40 - 50	B	Bagus
Diatas 50	SB	Sangat bagus

Dengan rumus perhitungan :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat/provinsi}} \times 100\%$$

2) Analisis rasio efektivitas PAD

Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD tahun anggaran yang bersangkutan, rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan PAD sesuai target (Kawatu, 2019). Kriteria dalam menentukan rasio efektivitas PAD dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.Kriteria efektivitas PAD

Percentase	Kriteria	Keterangan
Diatas 100%	SE	Sangat efektif
100%	E	efektif
90% - 99%	CE	Cukup efektif
75% - 89%	KE	Kurang efektif
Dibawah 75%	TE	Tidak efektif

Dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio efektivitas PAD} \\ & = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \end{aligned}$$

3) Analisis rasio efisiensi PAD

Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan PAD oleh pemerintah daerah. Perhitungan rasio ini membutuhkan informasi tambahan yang tersedia dalam LRA yaitu informasi biaya pengumpulan PAD. Semakin efisien pemerintah dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengumpulkan PAD, maka semakin rendah nilai rasio ini (Kawatu, 2019). Kriteria dalam menetukan rasio efisiensi PAD dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.Kriteria efisiensi PAD

Persentase	Kriteria	Keterangan
Diatas 60%	SE	Sangat efisien
60% - 80%	E	Efisien
80% - 90%	C	Cukup efisien
90% - 100%	K	Kurang efisien
Dibawah 100%	TE	Tidak efisien

Dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio efisiensi PAD} \\ & \quad \text{Belanja Daerah} \\ & = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{100\%} \end{aligned}$$

4) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis ini berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah berada pada tahun anggaran yang bersangkutan atau dalam masa pelaksanaan anggaran APBD, mengalami pertumbuhan pendapatan positif atau negatif. Dengan mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah, maka seseorang dapat menilai peluang daerah yang membutuhkan perhatian. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran (Susanto, 2019). Analisis ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Pendapatan} \\ & = \frac{\text{Pendapatan th kini} - \text{Pendapatan th lalu}}{\text{Pendapatan th lalu}} \times 100\% \end{aligned}$$

3. METODOLOGI

Data kuantitatif digunakan sebagai bahan penelitian. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan banyak angka untuk menginterpretasikan data yang digunakan dalam proses pengumpulan. Informasi tersebut diperoleh dari informasi yang dipublikasikan di website BPKAD Kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti rumus-rumus rasio yang telah dijelaskan diatas, yaitu (Lubis, et al., 2023) ;

- 1) Perhitungan nilai kemandirian daerah berdasarkan laporan kinerja APBD.
- 2) Perhitungan rasio efektivitas PAD berdasarkan laporan kinerja APBD.
- 3) Perhitungan rasio efisiensi PAD berdasarkan tingkat pencapaian APBD.
- 4) Perhitungan tingkat pertumbuhan pendapatan berdasarkan wilayah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan kinerja keuangan daerah Kota Magelang berdasarkan rasio keuangan sebagai penilaian kinerja daerah tersebut. Data yang digunakan untuk mengukur indikator pengelolaan kinerja keuangan Kota Magelang yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran periode 2016 – 2021.

1) Rasio kemandirian

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio kemandirian Kota Magelang periode 2016 – 2021 :

Tabel 4.Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Bantuan Pusat atau Provinsi (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
2016	220,315,848,702	567,658,016,710	38.81	Cukup
2017	233,557,714,356	555,812,848,063	42.02	Baik
2018	249,873,268,826	639,229,054,911	39.08	Cukup
2019	273,430,616,133	666,106,193,878	41.05	Baik
2020	290,756,816,510	630,995,258,727	46.08	Baik
2021	319,391,277,825	657,149,113,281	48.60	Baik

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan data analisis rasio kemandirian selama periode 6 tahun, rasio kemandirian Kota Magelang berada pada tingkat kategori rata-rata 42,61%, sehingga dapat dikatakan berada pada kategori baik. Jadi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah baik, karena hal tersebut merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Dalam kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Magelang telah mencukupi dengan baik kebutuhan daerahnya sendiri.

2) Rasio Efektifitas PAD

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio efektivitas Kota magelang periode 2016 – 2021 :

Tabel 5.Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2016	220,315,848,702	197,465,478,000	111.57	Sangat efektif
2017	233,557,714,356	218,085,185,000	107.09	Sangat efektif
2018	249,873,268,826	225,916,332,000	110.60	Sangat efektif
2019	273,430,616,133	242,404,296,000	112.79	Sangat efektif
2020	290,756,816,510	240,421,207,000	120.93	Sangat efektif
2021	319,391,277,825	251,821,496,000	126.83	Sangat efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rasio efektivitas Kota Magelang

JURNAL MANEKSI VOL 12, NO. 2, JUNI 2023

sangat efektif dengan rata-rata hasil sebesar 114,96% pada tahun anggaran 2016 – 2021. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas mencapai 111,57%, dimana pencapaian PAD lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas turun menjadi 107,09%, namun kinerja PAD masih bisa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, tingkat efektivitas meningkat menjadi 110,60%, dimana pencapaian PAD lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019–2021, tingkat efektivitas terus menerus meningkat seiring dengan kinerja PAD yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

3) Rasio efisiensi PAD

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio efisiensi Kota Magelang periode 2016 – 2021 :

Tabel 6. Analisis efisiensi PAD

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2016	871,859,130,603	840,042,626,525	103,78	Tdk efisiensi
2017	879,408,181,447	909,525,862,920	96,68	Kurang efisiensi
2018	937,339,746,423	908,085,351,541	103,22	Tdk efisiensi
2019	994,945,773,787	967,633,518,225	102,82	Tdk efisiensi
2020	798,353,191,714	946,188,761,537	84,37	Cukup efisiensi
2021	935,047,734,177	994,366,987,776	94,03	Kurang efisiensi

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan analisis rasio efisiensi PAD diatas selama kurun waktu 6 tahun, efisiensi PAD Kota Magelang berada tingkat 97,48%. Dalam hal ini berarti efisiensi pemerintah daerah Kota Magelang dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang efisien.

4) Analisis pertumbuhan pendapatan

Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan analisis pertumbuhan pendapatan periode 2016 – 2021 :

Tabel 7. Analisis pertumbuhan pendapatan

Tahun	Pendapatan tahun t (Rp)	Pendapatan tahun (t-1) (Rp)	Analisis Pertumbuhan (%)
2016	840,042,626,525	781,335,799,509	7,51
2017	909,525,862,920	840,042,626,525	8,27
2018	908,085,351,541	909,525,862,920	-0,158
2019	967,633,518,225	908,085,351,541	6,55
2020	946,188,761,537	967,633,518,225	-2,21
2021	994,366,987,776	946,188,761,537	5,09

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan dari tahun anggaran sebelumnya ke tahun anggaran berikutnya mengalami kenaikan (positif) dan penurunan (negatif). Pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan atau bisa dikategorikan positif dan meningkat sebesar 0,76%. Tahun 2018, pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang signifikan atau dikatakan bahwa pertumbuhan pendapatan dalam kategori negatif, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pada tahun 2019, pertumbuhan meningkat atau dapat

dikategorikan positif. Pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan kembali mengalami penurunan pendapatan hingga menyebabkan pertumbuhan pendapatan negatif, hal ini disebabkan karena adanya virus *Covid-19* yang melanda pada tahun 2020, yang menyebabkan perekonomian dari semua sektor sempat berhenti sejenak. Pada tahun 2021, pertumbuhan pendapatan meningkat kembali karena ditahun tersebut merupakan masa *new normal* dan semua sektor sudah mulai beroperasi kembali.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut Fidelius (2013) dalam (Susanto, 2019) dari perhitungan hasil rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang periode tahun anggaran antara 2016 – 2021, maka didapatkan hasil, antara lain :

- 1) Rasio kemandirian Kota Magelang periode tahun anggaran 2016 – 2021 dikategorikan baik, karena presentase rata-rata diatas 40%. Maka dapat disimpulkan bahwa daerah Kota Magelang cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kota Magelang tidak terlalu bergantung pada daerah lain dan transfer pusat untuk memenuhi kebutuhan dan sumber daya daerah tersenut, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara mandiri.
- 2) Rasio efektifitas PAD Kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021 dikategorikan sangat efektif karena persentase rata-rata diatas 100%. Berarti dalam hal ini kinerja daerah Kota Magelang lebih efektif daripada yang seharusnya. Rasio efektivitas diatas 100% menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengukuran kinerja, rasio efektivitas yang tinggi adalah hal yang baik dan menjadi indikasi bahwa daerah tersebut berhasil mencapai tujuannya dengan lebih baik dari yang diharapkan.
- 3) Rasio efisiensi PAD Kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021 dikategorikan kurang efisien, karena persentase rata-rata 97,48%. Persentase tingkat pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Magelang lebih banyak mengeluarkan dana untuk mengumpulkan PAD dalam menghasilkan keluaran (outcomes) dan menunjukkan bahwa dalam

- pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kota Magelang masih belum optimal.
- 4) Analisis pertumbuhan pendapatan kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021 mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah, seperti pandemic Covid-19 yang melanda selama kurang lebih 2 tahun yang telah mengakibatkan perekonomian dunia khususnya di Indonesia terhambat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti memberikan pendapat atau saran kepada pemerintah daerah Kota Magelang dalam pengelolaan keuangan daerah agar efektif, diantaranya :

1. Pemerintah daerah Kota Magelang diharapkan mampu lebih meningkatkan kemandirian daerah, agar tidak bergantung pada transfer pusat maupun daerah lain.
2. Pemerintah daerah Kota Magelang harus selalu bisa mempertahankan tingkat efektifitas serta berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah harus tetap lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah daerah Kota Magelang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dengan baik, meningkatkan potensi ekonomi daerah dan kualitas sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Z., 2019. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, Volume 4.
- Kawatu, F. S., 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Lubis, P. K. D., L. H. & Hidayah, N. F., 2023. ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN. *SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, III(1).
- Mariasari, V. & Sunaningsih, S. N., 2021. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PERIODE 2018-2020.
- JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta, Volume 7.
- Marliani, N., 2022. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, XIV(1).
- Mataris, H. & K. D., 2022. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017-2019. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 7.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S. & I. E., 2014. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOGAGU. *EMBA*, Volume 2.
- Pramono, J., 2014. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (studi kasus pada pemerintah kota surakarta). *Among Makarti*, VII(13).
- Qur'ani, S. & Panggiarti, E. K., 2021. THE ANALYSIS OF TERRITORY FINANCIAL RATIO AS PERFORMANCE VALUE IN THE GOVERNMENT OF MAGELANG CITY. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 5.
- Susanto, H., 2019. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, VII(1).